



PENGELOLAAN SAMPAH DI TANAH AIR

Pemerintah menargetkan tak ada lagi tempat pembuangan akhir (TPA) di seluruh daerah di Indonesia dengan konsep *open dumping* atau terbuka dalam waktu setahun ke depan. Kementerian Lingkungan Hidup akan memberikan sanksi terhadap pengelola sampah dengan konsep *open dumping*.



Pengelolaan Sampah

- Ada 343 TPA *open dumping* yang bermasalah.

Dampak Negatif TPA Open Dumping

- Mencemari lingkungan multidimensi.
- Mencemari air tanah melalui *leachate* yang tidak terkendali.
- Meningkatkan emisi gas rumah kaca karena menghasilkan metana.
- Mengganggu kesehatan masyarakat sekitar dengan radius dampak mencapai 3 hingga 5 kilometer dari lokasi TPA.

Total Sampah di Indonesia

(Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)

TERCATAT:

56,63 juta ton pada 2023

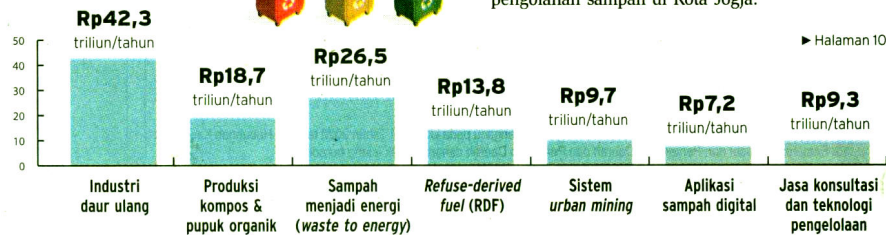


Peluang Ekonomi Penutupan 343 TPA Open Dumping

(Studi KLH bersama Bappenas)

Total Rp127,5 triliun

RINCIAN:



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (Bisnis.com) | Grafik: Harian Jogja/Sunu Jatmiko

► PENANGANAN SAMPAH

4.000 Ton Sampah di Depo Dibuang ke Piyungan

Alfi Annissa Karin & Yosef Leon
redaksi@jibnews.co

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja tengah mengosongkan sampah-sampah yang ada di depo-depo. Sedikitnya 4.000 ton sampah di depo-depo tersebut akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul.

Namun, Pemda DIY membatasi pembuangan sampah ke TPA Piyungan. Pemkot Jogja mulai menyiapkan langkah antisipasi saat bantuan truk pengangkutan sampah sebanyak 60 unit per hari selesai pada 1 April mendatang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan insinerator yang saat ini ditempatkan di TPA Piyungan.

“Untuk saat ini memang masih ada progres yang belum selesai. Mudah-mudahan April sudah bisa digunakan,” kata Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja, Ahmad Haryoko, Selasa (4/3).

Oleh karena itu, kata dia, saat ini jawabannya terus berupaya untuk mengosongkan depo-depo sampah yang ada di Kota Jogja. Pengosongan depo ini dilakukan agar sampah tak menumpuk dan melancarkan skema pengolahan sampah di Kota Jogja.

► Halaman 10

4.000 Ton...

Sampah-sampah yang diangkut, jelas Haryoko, tidak hanya dibawa ke beberapa titik pengolahan sampah milik Pemkot Jogja, seperti di Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Nitikan, Karangmiri, Kranon, dan di Piyungan. Sampah juga dibawa ke area TPA Regional Piyungan. "Karena Kota Jogja mendapat bantuan dari DLHK DIY agar sampahnya dibawa ke area TPA Regional," ujarnya.

Haryoko mengatakan pengangkutan sampah dengan skema *transporter* atau penggerobak rencananya siap diberlakukan pada Maret. Meski belum berjalan sepenuhnya, Haryoko memastikan skema itu sudah berjalan secara persuasif. Haryoko menuturkan sudah ada 632 penggerobak yang mendaftarkan diri ke DLH Kota Jogja.

Kemantren Pakualaman menjadi *pilot project* dari sistem pengangkutan sampah menggunakan *transporter*. Di sana masyarakat sudah secara sadar untuk melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Penggerobak atau *transporter* hanya akan mengambil sampah yang sudah terpilah. Sampah selanjutnya akan dibawa ke depo sampah. "Kalau yang lain nanti ke depo. Sudah disiapkan armadanya," ungkapnya.

Sekda DIY, Beny Suharsono, menjelaskan Pemda DIY menyiapkan lahan di TPA Piyungan untuk sekitar 4.000 ton dari depo-depo di Kota Jogja. Pemkot bisa mengirim sampah dari berbagai depo ke TPA Piyungan.

Hal ini diperlukan karena TPS3R yang dimiliki Kota Jogja belum bisa mengakomodasi banyaknya sampah dari depo-depo. "Saat ini, pengolahan sampah di beberapa wilayah [Kota Jogja] masih belum bisa beroperasi penuh. Oleh karena itu, evakuasi

sampah harus dilakukan secara bertahap," katanya, Selasa.

Bila tidak ditangani dengan cepat, dikhawatirkan tumpukan sampah akan semakin menggunung. Apalagi sebentar lagi banyak wisatawan dan pemudik yang akan masuk ke Jogja pada libur lebaran mendatang. Sedangkan untuk wilayah kabupaten lain seperti Bantul dan Sleman, pengelolaan sampah masih bisa dikelola pemkab masing-masing karena masih memiliki cukup lahan. "Namun, di kota, penanganan harus lebih sistematis," ungkapnya.

Pada Maret ini juga akan diluncurkan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) Bawuran, Bantul, yang bisa dimanfaatkan oleh Pemkot Jogja. Di ITF Bawuran terdapat dua aktivitas, yakni pengelolaan sampah dan mengolah sampah menjadi bahan industri.

"Ini baru yang mengelola sampahnya. Nantinya Kota Jogja dan Bantul akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Itu sudah direncanakan akan diluncurkan. Itu dukungan kami. ITF Bawuran bisa digunakan siapa saja, tapi harus kerja sama," kata dia.

Diharapkan dengan dukungan ini pengelolaan sampah di Kota Jogja dan kabupaten sekitarnya bisa lebih maksimal. Tidak ada lagi penumpukan sampah di depo maupun sampah liar di tepi jalan yang banyak ditemui di wilayah perbatasan kabupaten-kota.

ITF Bawuran

Sementara itu, rencana operasional ITF Bawuran di Kabupaten Bantul semakin dekat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Bantul, Fenty Yusdayati, mengatakan berdasarkan komunikasinya dengan pihak

terkait fasilitas pengolahan sampah ini akan mulai beroperasi pada 10 Maret. "Komunikasi terakhir infonya begitu, tapi belum tahu diresmikan kapan. Namun yang jelas, persiapan sudah semakin matang," ujar Fenty, Selasa.

Dalam operasional awalnya, ITF Bawuran tidak akan langsung beroperasi dengan kapasitas maksimal yang digadang-gadang bisa mencapai 70 ton per hari. "Untuk awalnya mungkin kami coba dulu dengan 10 hingga 20 ton," jelas Fenty.

Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar sebelum mencapai kapasitas penuh. Sebab masih ada beberapa aspek teknis yang masih dalam penyempurnaan yang nantinya memungkinkan pemrosesan sampah secara optimal. "Sampah yang masuk akan dibakar dengan suhu tinggi, di atas 1.000 derajat celcius," jelasnya.

Proses ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan dan meminimalisasi dampak lingkungan. ITF Bawuran akan menangani sampah dari berbagai wilayah, tapi dominasi terbesar berasal dari kawasan perkotaan. "Saat ini banyak tempat pembakaran liar di masyarakat. Jika ITF ini sudah beroperasi, kami akan meminta agar praktik tersebut dihentikan," kata Fenty.

Pembakaran sampah tanpa fasilitas yang memadai sering kali menimbulkan polusi udara dan masalah kesehatan. Dengan adanya ITF Bawuran, diharapkan masyarakat tidak lagi membakar mandiri yang tidak terkontrol.

Meskipun ada harapan ITF Bawuran bisa mulai beroperasi pada Maret, Fenty tidak ingin memberikan kepastian sebelum ada keputusan final. "Namun yang pasti akan disesuaikan dengan jadwal yang ada," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005